

ABSTRAK

Aqidian Rifqi, 2014: *pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pada pnpm mandiri pedesaan desa curahmalang kecamatan rambipuji kabupaten jember) tahun 2013-2014*

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mulai mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama berjalannya program tersebut dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan dari PPK diantaranya adalah menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat yang miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember? Untuk Sub Pokok Masalahnya adalah: a) Bagaimana strategi pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember? b) Apa saja kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember? c) Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang ada pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?

Peneliti ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember 2013-2014

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, sedangkan metode pengumpulan datanya meliputi : metode obsevasi, interview dan dokumentasi penentuan informasi dengan menggunakan teknik *purposiv sampling*. Adapun analisa datanya menggunakan analisis *deskriptif*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang biasanya muncul lebih sering pada saat perekrutan kader, yaitu kader pada umumnya adalah karena kader merupakan tenaga sukarela yang tidak jarang juga sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Serta banyak masyarakat yang masih belum mengerti tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan sehingga masyarakat kurang begitu memperhatikan atau bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam musyawarah sebelumnya. Penanganan permasalahan program akan dikoordinasikan secara bertahap yaitu dengan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masalah, mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa, menyampaikan informasi mengenai pengaduan masalah, menyampaikan hasil klarifikasi dan memastikan hasil klarifikasi dengan peserta pertemuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gejolak masalah yang sedang dialami bangsa Indonesia pada saat ini telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan. Salah satunya adalah taraf kesejahteraan masyarakat. Naiknya harga bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat telah menyeret mereka kedalam jurang kemiskinan. Selain itu, tingkat inflasi di Indonesia memaksa para pemilik perusahaan untuk melakukan PHK. Dengan demikian, tingkat pengangguran semakin tinggi dari tahun ke tahun yang menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian hampir semua orang di dunia. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang “kebal” dari masalah kemiskinan. Hampir semua Negara di dunia ini, mengakui bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang menghambat kesejahteraan masyarakat, dan Negara-negara tersebut setuju bahwa kemiskinan harus segera ditanggulangi (Suharto, 2009: 14).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat membutuhkan penanganan secepat mungkin dari semua pihak. Adapun ayat Al-Qur'an yang menyampaikan tentang pentingnya pemberantasan kemiskinan, yaitu dalam Q. S. Al-Baqarah: 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٧١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Kemiskinan pada hakikatnya merujuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Perlindungan sosial adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, karena perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional (Suharto, 2009: 3). Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok yang rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal di setiap Negara.

Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk mengurangi dampak kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat, hal inilah yang seharusnya menjadi fokus utamanya bagi para pelaku kebijakan dan para

pekerja sosial yang peduli terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian kepedulian saja tidak cukup, diperlukan langkah dan strategi yang aplikatif dalam menangani masalah sosial ini, salah satunya melalui program pemberdayaan.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mulai mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama berjalannya program tersebut dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan dari PPK diantaranya adalah menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat yang miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri sendiri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan misi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaganya,
- 2) pelembagaan system pembangunan partisipatif,
- 3) mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah lokal,
- 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana,
- 5) mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan bagian dari program yang pro rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat dalam pengentasan masalah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi dan konstitusi salah satu butir pancasila, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah yang terpencil, tetapi juga dapat terjadi di tempat-tempat yang bisa dikatakan tidak terlalu terpencil atau bahkan tidak terpencil, seperti di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji. Untuk itu pemerintah juga menyediakan PNPM-MP yang dimaksudkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Berbagai pihak baik dari masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) turut menjadi pihak yang berkepentingan untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Ruang lingkup PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang yang telah disepakati oleh masyarakat meliputi: penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat (perhatian yang lebih besar diberikan kepada kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir), pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat Desa Curahmalang dapat merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan masalah kemiskinan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat Desa Curahmalang terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan masalah kemiskinan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang memiliki banyak objek atau lahan yang belum dimanfaatkan untuk dapat memberdayakan masyarakat sekitar, yaitu untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Desa Curahmalang juga memiliki kerukunan antar warga maupun antar suku yang sangat tinggi, melihat penduduk yang tinggal di Desa Curahmalang terdiri dari masyarakat Jawa dan Madura. PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang termasuk

salah satu yang paling lancar dan partisipasi masyarakatnya cukup tinggi, sehingga dapat mempercepat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Puji Santoso, selaku tim verifikasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rambipuji, menyampaikan bahwasannya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang sebelum adanya program PNPM Mandiri Perdesaan hanya berjumlah 6 gedung sekolah, saat ini setelah berjalannya Program PNPM Mandiri Perdesaan jumlahnya sudah meningkat menjadi 15 gedung sekolah yang terdiri dari 8 gedung PAUD dan 7 gedung TK. Selain itu, jumlah pembangunan sarana prasarana umum juga terus ditingkatkan, seperti perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tingkat keberhasilan dari program PNPM Mandiri Perdesaan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah belanja rumahtangga perdesaan, hal tersebut dikarenakan adanya program Bantuan Langsung untuk Masyarakat dan Simpan Pinjam untuk Perempuan, sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Kecamatan Rambipuji menunjukkan adanya peningkatan jumlah belanja rumahtangga yang cukup besar dibanding dengan desa yang non-program. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa meningkatnya kapasitas kinerja lokal, kelembagaan, dan pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya

masyarakat yang mengajukan permohonan penambahan modal usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang telah mereka lakukan sebelumnya maupun untuk masyarakat yang masih akan memulai usaha baru.

Dengan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang, meningkatnya akses ke pasar, telah dibangun dan direnovasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta sarana dan prasarana desa yang telah dibangun melalui metode PNPM Mandiri Perdesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Rata-rata 45% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh pemerintah maupun kontraktor. Sejak adanya program PNPM Mandiri Perdesaan, partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan dan pertemuan terus meningkat, berkisar antara 25% sampai 40% (PNPM-MP Kab. Jember).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambupuji, Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian (Tim Penyusun STAIN Jember, 2013: 68). Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Masalah sebagai kesenjangan yang ada diantara kenyataan

dan harapan perlu dirumuskan secara eksplisit. Masalah tersebut dapat diungkapkan dari keluhan-keluhan yang ada di lingkungan sosial yang bersangkutan.

Perumusan masalah secara sistematis sangatlah diperlukan, agar tidak terjadi pembahasan keluar dari koridor masalah yang ada. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, peneliti terlebih dahulu merumuskan pokok masalah dan sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Pokok Masalah

Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?

2. Sub Pokok Masalah

- a. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang ada pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah (Tim Penyusun STAIN Jember, 2013: 68), atau karena adanya suatu tujuan

yang ingin diketahui maupun yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk lebih jelasnya dari tujuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
- b. Untuk mendeskripsikan kendala dari pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
- c. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala dalam pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ataupun karya tulis ilmiah pada dasarnya akan lebih bermanfaat apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Teoritis

Di harapkan dapat menambah pengetahuan serta manfaat bagi akademisi mengenai pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi alternatif bagi lembaga yang terkait dalam merancang sebuah program kerja serta dapat menambah pengetahuan terhadap realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi peneliti di harapkan penelitian ini dapat menambah wawasan,, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah dapat dapat diartikan “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah dan tidak beruntung (Suharto, 2009: 82).

2. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan hidup untuk masyarakat.

3. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Jadi, pengertian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah program yang dilakukan para pekerja sosial untuk pemberkuasaan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk alur pikiran dalam pembahasan ini, maka hasil analisis data tersebut dijabarkan secara sistematis dalam bentuk bab yang dikemukakan secara singkat sebagai berikut:

BAB I, yaitu Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini akan dipaparkan kerangka pemikiran serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini akan disajikan pembahasan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi pemberdayaan ekonommi.

BAB III, Metode Penelitian. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Penyajian Data dan Analisis Data. Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian yang mendeskripsikan secara umum objek penelitian tersebut, penyajian data dan analisis data yang memuat tentang

uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur pada bab III.

BAB V, Penutup. Berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, dan tentang saran-saran yang direkomendasikan dari sumber temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh:

a. Nurul Indah Wati dengan judul Pemberdayaan ekonomi Masyarakat oleh Pondok Pesantren Al-Ishlah Mayang-Jember (STAIN: 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pondok Pesantren dan di luar lingkungan Al-Ishlah Mayang-Jember. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu kurangnya peran serta pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga hal tersebut dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ishlah Mayang-Jember.

b. Dahri Novan Uji Iskandar dengan judul Peranan Pondok Pesantren Moderen Darussalam Gontor Ponorogo Dalam Upaya Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat (STAIN: 2009). Penelitian ini lebih mengkaji tentang peranan Pondok Moderen Darussalam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu tidak adanya program

pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga hal tersebut dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Moderen Darussalam Gontor Ponorogo.

c. Almasdi Syahza dengan judul Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau

(Universitas Riau: 2003). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan dengan sistem agribisnis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey, dan penelitian ini menghasilkan temuan yaitu terjadinya kesenjangan antara daerah pengembangan kawasan industri dengan pengembangan kawasan pertanian.

d. Andi Muhammad Ferdiansyah dengan judul Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dikecamatan Tugu, Semarang (Universitas Diponegoro: 2008).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu munculnya permasalahan yang berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya, penguasaan teknologi serta kemampuan berusaha dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir.

e. Meri Nurami dengan judul Peran Modal Sosial pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Usaha Daur Ulang di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo) (Universitas Brawijaya: 2007). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan

jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu kurangnya hubungan kerjasama antar sesama pelaku usaha daur ulang masih terbatas dalam hal penyediaan bahan baku, proses produksi maupun pemasaran, serta kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menunjang usaha pemberdayaan masyarakat.

Dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti mengambil dari sisi yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu yang pertama peneliti lebih mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pondok Pesantren dan di luar lingkungan Al-Ishlah Mayang-Jember. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian yang kedua peneliti lebih mengkaji tentang peranan Pondok Modern Darussalam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu tidak adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga hal tersebut dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Modern. Pada penelitian yang ketiga peneliti bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan dengan sistem agribisnis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey, dan penelitian ini menghasilkan temuan yaitu terjadinya kesenjangan antara daerah pengembangan kawasan industri dengan pengembangan kawasan pertanian. Pada penelitian yang keempat peneliti menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu munculnya permasalahan yang berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya, penguasaan teknologi serta kemampuan berusaha dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir. Sedangkan pada penelitian yang kelima yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu kurangnya hubungan kerjasama antar sesama pelaku usaha daur ulang masih terbatas dalam hal penyediaan bahan baku, proses produksi maupun pemasaran, serta kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menunjang usaha pemberdayaan masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan adalah cara dimana masyarakat mampu menguasai atas kehidupannya sendiri (Huraerah, 2008: 82).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu: peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang tahan lama untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan

sosial dan pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan motivasi dan perannya (Huraerah, 2008: 82-83).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah pemberantasan kebodohan. Dengan demikian, visi pelayanan sosial adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam arti yang luas dan mendalam, yaitu dengan mengubah sikap masyarakat untuk menghilangkan sikap ingin diberi, dan menggantinya dengan menumbuhkan sikap yang mandiri untuk mengarahkan segala kemampuannya dalam meraih kesejahteraan dengan usahanya sendiri (Wibhawa, 2010: 75).

Peran para pelaku perubahan maupun pemberdayaan masyarakat bukanlah sebagai seseorang yang akan melaksanakan seluruh kegiatan oleh dirinya sendiri, akan tetapi lebih ke arah untuk memampukan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perubahan dilingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang akan dikerjakan (Rukminto Adi, 2008: 91).

Pengembangan masyarakat di Indonesia telah ditekankan pada desa, hal tersebut dikarenakan lebih dari 2/3 penduduk Indonesia berada di daerah perdesaan. Dari sektor ekonomi, wilayah perdesaan di Indonesia juga menjadi sumber kehidupan karena Indonesia merupakan Negara agraris. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia akan menjadi kurang berarti apabila tidak dilakukannya pembangunan terhadap masyarakat desa. Pemilihan pembangunan masyarakat desa sebagai titik yang sentral,

pembangunan masyarakat di Indonesia juga dilakukan karena masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin tersebut adalah sebagai berikut (Huraerah, 2008: 172-173):

- a. Strategi pemecahan masalah, hal tersebut dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Teknik motivating dan supporting bisa digunakan untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka.
- b. Konfrontasi, merupakan strategi mengonfrontasikan masyarakat miskin dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Strategi tersebut dimaksudkan untuk dapat menimbulkan kesadaran, menggalang kesatuan, dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam mengatasi masalah tersebut.
- c. Membangun kelembagaan baru, yaitu membangun lembaga-lembaga baru dilngkungan sekitar dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat, dimana lembaga tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang miskin. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin harus senantiasa dikembangkan secara optimal, seperti: koperasi unit desa, kelompok usaha bersama, dan lain-lain. Apabila dilingkungan tersebut terdapat lembaga tapi tidak berfungsi secara maksimal, maka yang harus

dilakukan adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali sesuai dengan fungsinya secara maksimal.

- d. Pengembangan dan peningkatan ketrampilan hidup (life skills), yaitu dengan mengajarkan cara-cara serta alat-alat untuk melakukan perubahan yang sudah direncanakan.
- e. Terapi pendidikan, yaitu strategi untuk mengikutsertakan masyarakat miskin dalam suatu program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk latihan-latihan, saling bekerjasama secara demokratis, dan belajar untuk menilai dan menghargai kerjasama tersebut. Strategi terapi pendidikan ini akan memperkuat pemerintah pada tingkat lokal, serta mendorong proses pembangunan untuk menimbulkan rasa satu kesatuan sebagai anggota masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa. Pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat desa ini tidak ada. Perkembangan dari pembangunan desa dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi oleh negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat.

Secara teoritis agar suatu desa berkembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Desa
2. Masyarakat desa, penduduk yang merupakan satu kesatuan masyarakat yang tinggal pada unit pemerintahan terendah langsung dibawah camat.
3. Pemerintah desa, merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah kepala desa.

Dalam upaya mengembangkan masyarakat di tingkat local, baik organisasi pemerintahan maupun yang nonpemerintahan. Selain dibantu oleh tenaga pendamping (*fieldworker* atau fasilitator lapangan), biasanya dibantu oleh tenaga kader (*indigenous worker*). Kader diharapkan dapat menggantikan peranan petugas pembangunan desa dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Kader adalah orang yang berasal dari masyarakat setempat yang dengan sukarela untuk ikut serta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pembangunan desa. Kader dapat terdiri dari wanita atau pria, tua maupun muda, sudah bekerja ataupun belum bekerja, yang penting mereka merasa terpenggil, ada kesediaan dan kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya.

Kader dapat melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, setelah memperoleh pelatihan. Tugas seorang kader pada intinya adalah:

- a. Sebagai pelopor dalam melaksanakan kegiatan,
- b. Pelaksana dan pemelihara kegiatan program pembangunan desa,
- c. Menjaga kelangsungan kegiatan,
- d. Membantu dan menghubungkan antara warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang pembangunan desa.

Untuk memperoleh kader pembangunan yang mapan, tekan yang utama diberikan kepada calon kader untuk ikut serta dalam program pelatihan sebagai kader. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kesadaran diri, merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu untuk masyarakatnya dan mempunyai jiwa suka memberi bantuan terhadap sesama.

Kader yang dipilih dari lingkungan masyarakat dapat terdiri dari pemuda yang belum berkeluarga, pamong desa ataupun orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Permasalahan dalam mencari kader pada umumnya adalah karena kader merupakan tenaga sukarela yang tidak jarang juga sudah mempunyai pekerjaan tetap, apabila tugas utamanya menuntut keaktifannya, maka mereka akan mengesampingkan atau bahkan mengabaikan tugas mereka sebagai kader. Terkait dengan hal tersebut, perekrutan kader lebihutamakan dari generasi muda yang masih mempunyai idealism yang seringkali lebih menguntungkan.

Masalah lain yang dihadapi oleh seorang kader adalah beban yang diberikan kepada kader seringkali dirasa terlalu berat bagi jenis pekerjaan yang bersifat sukarela. Seorang kader diharuskan berperan di bidang yang diluar kemampuannya, serta tugas yang melebihi batas kemampuannya.

Oleh karena itu, penambahan kader dan peningkatan pengetahuan, serta keterampilan para kader yang merupakan modal manusia dalam suatu komoditas yang perlu direncanakan secara bertahap.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan dalam rangka pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Hikmat, 2010: 3). Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut, sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian yang baru. Proses harus dilakukan secara kumulatif, sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula kemampuannya dalam berpartisipasi.

a. Pengertian partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi yang sesungguhnya berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri, yang bertujuan untuk suatu proses demokrasi. Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas (Rukminto Adi, 2008: 106-108). Dalam hal ini,

partisipasi dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, merasa percaya diri dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian diatas, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada dilingkungan sekitar, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahann ini, akan menjadikan masyarakat lebih berdaya dan dapat memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.

Sebaliknya, apabila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang telah direncanakan oleh para pelaku perubahan, maka masyarakat akan cenderung menjadi lebih tergantung kepada para pelaku perubahan tersebut. Apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat kepada pelaku perubahan akan semakin meningkat (Rukminto Adi, 2008: 108-111).

b. Pengelompokan partipasi masyarakat

Pengelompokan partisipasi masyarakat jika dilihat dari penggunaan partisipasi dapat dibedakan menjadi:

1) Partisipasi sebagai alat

Pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggung jawab, dan efisien.

2) Partisipasi sebagai tujuan

Setiap warga Negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakann yang diharapkan akan berdampak positif terhadap hidupnya.

3) Tingkatan partisipasi masyarakat

Tingkatan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan partipasi, yaitu:

1. Berbagi informasi bersama (sosialisasi), pemerintah menyebarluaskan inforamasi tentang program yang akan direncanakan maupun hanya memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak masyarakat untuk melaksanakannya.
2. Konsultasi (umpan balik), pemerintah meminta kritik dan saran kepada masyarakat sebelum menetapkan suatu keputusan akhir. Pengambilan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai

penggagas. Akan tetapi masyarakat dilibatkan dalam merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran serta masyarakat dapat mempengaruhi hasil akhir.

3. Kendali, masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan dapat menolak pelaksanaan keputusan apabila bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan partisipasi sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, atau bisa juga dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan partisipasi tersebut, partisipasi inisiasi memiliki kadar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi legitimasi dan partisipasi eksekusi. Pada partisipasi inisiasi masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan,

tetapi bisa mengusulkan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan apabila masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan seperti rembug desa, padahal proyek yang akan dibangun sudah jelas wujudnya, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi saja. Sementara partisipasi eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi tersebut, masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut.

4) Bentuk partisipasi masyarakat

Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang sekiranya dapat memberikan kontribusi sehingga mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam rapat.
2. Partisipasi tenaga dan harta benda, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan lain sebagainya.
3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan partisipan untuk mendorong berbagai bentuk usaha maupun industri.

4. Partisipasi sosial, yang diberikan partisipan sebagai tanda keguyuban, misalnya ikut serta dalam kegiatan sosial yang ada dilingkungan sekitarnya.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras, yaitu:

- 1) Aras mikro. Pemberdayaan ini dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, yang bertujuan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya.
- 2) Aras mezzo. Pemberdayaan ini dilakukan terhadap sekelompok klien untuk diberikan pelatihan yang biasanya dilakukan sebagai strategi dalam mengangkat kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Aras makro. Pemberdayaan ini biasa disebut juga sebagai strategi system besar, hal tersebut dikarenakan sasaran pemberdayaan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi system besar menganggap klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih strategi yang tepat untuk bertindak (Huraerah, 2008: 92-93).

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam program pemberdayaan masyarakat, yaitu (Huraerah, 2008: 93):

- a. Membangun relasi yang:
 - 1) Menekankan kerjasama klien;
 - 2) Menghargai pilihan dan hak klien untuk menentukan nasibnya sendiri;
 - 3) Menghargai perbedaan antar individu;
 - 4) Merefleksikan respon empati.
- b. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:
 - 1) Menganggap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar;
 - 2) Memperkuat partisipasi klien dalam berbagai aspek untuk memecahkan suatu permasalahan;
 - 3) Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- c. Membangun komunikasi yang:
 - 1) Mempertimbangkan keragaman individu;
 - 2) Menghormati martabat dan harga diri klien;
 - 3) Berfokus pada klien.

4. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan selama komunitas tersebut masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Proses pemberdayaan lebih banyak dikaitkan sebagai unsur untuk mendorong sosial-ekonomi. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses untuk memberikan fungsi sebagai kekuasaan dalam pencapaian dari suatu tujuan yaitu pengembangan diri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dalam merangkai usaha untuk memperkuat kemandirian atau juga biasa disebut *community self-reliance*. Dalam proses kemandirian masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, membantu masyarakat untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Dalam proses tersebut masyarakat juga dibantu untuk merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan telah ditentukan, dan bagaimana cara membangun strategi untuk memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dengan kata lain, prinsip yang lebih diutamakan dalam proses pemberdayaan adalah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan kemauannya sendiri (Huraerah, 2008: 87).

Memberdayakan adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah untuk lebih memajukan dan memandirikan masyarakat (Huraerah, 2008: 87).

Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan, yaitu:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
2. Melakukan analisis terhadap masalah tersebut secara mandiri. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi, curah pendapat, serta mengadakan pertemuan secara berkelanjutan.
3. Menentukan skala prioritas masalah, yaitu memilah dan memilih masalah yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.
4. Mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dengan melakukan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan tersebut untuk dinilai tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang biasa disebut dengan 5P, yaitu:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara maksimal.
2. Penguatan, memperkuat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memecahkan masalah serta untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama yang lemah agar tidak terjadi penindasan oleh masyarakat yang lebih kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah terjadinya eksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas dalam kehidupannya dengan baik.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok tetap terjaga dengan baik.

5. Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat ini, paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-segalanya kini sudah mulai digeser dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi actor utama dalam proses pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat masyarakat sampai kepada tingkat yang masyarakat yang maksimal.

Apabila dilihat dari tingkatannya, pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar.
- b. Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Memiliki kesadaran terhadap berbagai potensi yang ada, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan.

- d. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.
- e. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungan sekitarnya. Tingkatan yang terakhir ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi serta mengendalikan berbagai program, kebijakan institusi, dan pemerintah.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan antara lain:

- a. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
- b. Upaya untuk memahami potensi diri, kekuatan, kelemahan, dan memahami lingkungan.
- c. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
- d. Upaya penguatan kebijakan.
- e. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik yang lebih tertarik untuk menelaah fenomena-fenomena social budaya yang berlangsung secara alamiah (Arikunto, 2006: 12).

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data asli, artinya suatu data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta memiliki makna yang mendalam, sehingga melalui pendekatan kualitatif setiap fenomena yang ada di lapangan dan berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dipahami secara mendalam sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data yang diperoleh mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai yang tidak tampak (Sugiono, 2008: 13).

Dikatakan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan merupakan gambaran dari ucapan-ucapan, karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Laporan ini berisi kutipan-kutipan yang diberikan oleh informan sehingga dapat diperoleh hasil dari interview dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan orientasi atau perspektif teoritis fenomenologi. Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar terhadap fenomenologis, oleh karena itu fenomenologi dijadikan sebagai dasar utama, sedangkan yang lainnya yaitu

interaksi sosial, kebudayaan dan etnomologi sebagai dasar tambahan. Fenomenologis berpendapat bahwa kebenaran terhadap sesuatu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang sedang diteliti. Dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek subjektif dari perilaku individu.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengumpulkan sejumlah data atau informasi secara mendalam dan mendetail tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan (STAIN, 2013: 75). Sebelum penelitian dilakukan biasanya peneliti melakukan survei awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi tersebut, sehingga peneliti dapat memahami kondisi objek penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti terletak di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Desa Curahmalang, merupakan desa yang baru ada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut baru masuk ke Desa Curahmalang sekitar tahun 2010, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang dikemukakan sendiri oleh pihak yang hadir langsung pada waktu kejadian tersebut berlangsung, dan data sekunder merupakan sumber data yang digambarkan bukan oleh orang yang mengalami sendiri pada waktu kejadian sedang berlangsung (Arikunto, 2006: 83).

Pemilihan subjek penelitian (informan) dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk menentukan informan kunci.

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, yaitu diantaranya dengan Tim PNPM Mandiri di desa Curahmalang:

- a. Tim Pengelola Kegiatan (M. Yasin Yusuf, S. Sos)
- b. Tim Penyusun Usulan (Fahmi Aziz, S. Pd. I)
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Nurbani Rahayu)

Data primer juga diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap peristiwa yang ada di lokasi.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini sangat membantu sebagai bahan untuk membandingkan dan memperkuat data yang ada di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap sumber tertulis, dan foto-foto lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang akan diteliti (Fathoni, 2006: 104).

Metode ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, ataupun perilaku (Faisal, 2005: 52). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah-langkah sistematis dalam mengamati objek penelitian dengan menggunakan pedoman instrument observasi, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu meliputi sarana dan prasarana yang disediakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Metode Interview

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Moleong, 2007: 186). Tujuan dari wawancara

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yaitu dengan pihak yang diwawancara untuk diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu diantaranya dengan Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penyusun Usulan, Kader Pemberdayaan Desa, dan Warga Desa.

c. Metode Dokumenter

Metode dokumenter digunakan dengan cara bahwa pemakaian dan perolehan data tidak terlalu sulit, karena data tersebut sudah tersedia. Selain itu apabila terjadi kesalahan, data masih tetap asli tidak akan berubah.

Metode dokumenter merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, dan lain-lain (Arikunto, 2006: 231).

Dalam metode documenter ini, meliputi dokumen-dokumen tentang program yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori tema, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2007: 147).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data lapangan. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

sedang berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Dalam analisis data terdapat tiga alur, yaitu sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*data reduction*)

Sebelum melakukan reduksi data, peneliti telah melakukan pengumpulan data dari lapangan. Data-data yang sudah terkumpul melalui pencatatan yang teliti dan rinci, maka akan menghasilkan data yang banyak, kompleks, dan rumit menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan reduksi data agar data-data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data serta melengkapinya.

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

b) Penyajian Data (*data display*)

Setelah data-data tersebut direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi, dan merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penyajian data merupakan informasi yang sudah tersusun dan dapat berupa narasi, grafik, tabel, dan lain-lain.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan ter gali maupun yang sudah terkumpul dengan cara membandingkannya, mencari tema, pola, persamaan, pengelompokan, dan memeriksa hasil yang telah diperoleh dalam penelitian.

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah, apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian tentu harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh semua pihak, untuk itu perlu diadakannya pengecekan keabsahan data. tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Uji keabsahan data dalam penelitian, seiring hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, criteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif (Sugiono, 2008: 267).

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiono, 2008: 272).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang artinya mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda (Moleong, 2007: 330-331). Hal ini dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Misalnya; pengamatan langsung terhadap program yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang dan membandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat sekitar.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang penting. Misalnya; membandingkan hasil wawancara dengan kader PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang dengan dokumen-dokumen yang berkaitan yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang.

Tringulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik, alat, dan waktu yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara kemudian dicek dengan teknik observasi dan dokumenter.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan

laporan (Tim Penyusunan STAIN Jember, 2013: 54). Adapun tahapan-tahannya sebagai berikut:

1. Tahap *Pra-research*. Pada tahapan ini, peneliti melakukan bedah teori terhadap variabel penelitian yang akan diteliti.
2. Tahap menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala hal kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Seperti halnya dengan membentuk kerangka subjek permasalahan yang dikemas dalam pedoman wawancara, pedoman observasi dan sekaligus kebutuhan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang bertujuan dapat memahami objek penelitian secara mendalam.
3. Setelah tahap pertama dan kedua telah dilakukan, maka pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian akan diawali dengan mengumpulkan data dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hal ini bertujuan untuk memvalidkan data yang telah diperoleh.
4. Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Dari hasil pencatatan wawancara, observasi, dan dokumentasi (foto, bagan, dan lain-lain) dimasukkan dan dikembangkan dalam bentuk laporan yang disesuaikan dengan bahasa narasumber ataupun bahasa yang dikembangkan oleh peneliti sendiri.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang

Pokok permasalahan dari banyaknya pengangguran di Desa Curahmalang lebih dikarenakan oleh rendahnya kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menanggulangnya adalah dengan menggunakan pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat yaitu memadukan antara aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, serta pendayagunaan. Seperti firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Di mulai pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama berjalannya program tersebut dianggap berhasil. Beberapa keberhasilan dari PPK diantaranya berupa penyediaan lapangan kerja bagi kelompok warga miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan partisipasi masyarakat.

2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang

Visi dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya segala macam kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir ⁴¹diri sendiri untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dilingkungan sekitarnya, serta mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Misi dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakatnya,
- b. Sistem yang partisipatif dalam kelembagaan,
- c. Mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah lokal,
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat,
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

3. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang

Tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin dengan cara mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan pembangunannya.

Tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan,
- b. Mengelola sumber daya lokal dengan pembangunan yang partisipatif,
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa untuk memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,
- d. Menyediakan prasarana, sarana sosial dasar yang diprioritaskan untuk masyarakat,
- e. Mengelola dana yang bergulir.

4. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang mempunyai prinsip dasar yang selalu menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik belaka.
- b. Otonomi. Masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa adanya intervensi yang negatif dari pihak lain.
- c. Desentralisasi. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta dalam pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, maupun dalam bentuk materil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Masyarakat mengambil keputusan dalam pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

- h. **Transparansi dan akuntabel.** masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. **Prioritas.** Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan manfaatnya untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- j. **Keberlanjutan.** Dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem pelestariannya.

5. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat maupun pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah, ketentuan-ketentuan dasar tersebut meliputi:

a. Desa berpartisipasi

Desa penerima PNPM Mandiri perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah

secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan kegiatan yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin,
- 2) Berdampak langsung untuk peningkatan kesejahteraan,
- 3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat,
- 4) Didukung oleh sumber daya yang ada,
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin,
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal),
- 3) Peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha masyarakat, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal),
- 4) Penambahan modal Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP).

b. Mekanisme usulan kegiatan

Di Desa Curahmalang dapat mengajukan tiga usulan untuk dapat dibiayai dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, tiga usulan tersebut yaitu:

- 1) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan maupun pendidikan) atau untuk meningkatkan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa khusus perempuan,
- 2) Usulan kegiatan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM Kecamatan, akan tetapi harus mempertimbangkan hasil dari survei kelayakan kelompok,
- 3) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan maupun pendidikan), dan untuk meningkatkan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa perencanaan.

c. Swadaya masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang. Swadaya dapat

diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

d. Kesetaraan dan keadilan gender

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang dilakukan para pekerja sosial untuk pemberkuasaan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan kepadamu

Menurut hasil wawancara yang saya dapat dari bapak Fahmi Aziz, S. Pd. I (Tim Penyusun Usulan), pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Curahmalang adalah pengembangan masyarakat (*community development*):

“*Community development* adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat terlibat secara langsung dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki hingga mencapai tahap tertentu, berbagai kegiatan tersebut membutuhkan lembaga yang lebih formal. Bekerja bersama masyarakat dan memberi pengarahan kepada masyarakat untuk bisa menolong dirinya sendiri adalah prinsip utama dalam penerapan metode ini”. (interview, 28 Mei 2014).

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin (tokoh masyarakat desa Curahmalang) mengenai pengembangan masyarakat yang diterapkan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Curahmalang:

“Pengembangan masyarakat sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mempermudah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Karena dalam hal ini masyarakat terlibat secara langsung dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki, sehingga dapat mencapai tahap tertentu yang mereka kehendaki”. (interview, 7 Juni 2014).

Dalam pengembangan masyarakat tersebut perlu adanya pembangunan lembaga baru, yaitu membangun lembaga-lembaga untuk masyarakat dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung kedalam suatu lembaga maupun lapangan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat harus senantiasa ditumbuhkembangkan, misalnya kelompok usaha bersama, koperasi, dan lain-lain. Apabila dilingkungan tersebut sudah tersedia lembaga bagi masyarakat tetapi tidak berfungsi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya untuk memfungsikan/mengaktifkan kembali lembaga tersebut.

2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Maksud dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah cara para pekerja sosial untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Strategi Dasar

- a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2. Strategi Operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan masalah yang dihadapinya.

- f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Nurbani Rahayu (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan desa Curahmalang adalah strategi partisipasi dan kemandirian.

“Partisipasi sangat diperlukan dalam membentuk kemandirian proses pemberdayaan, hal itu dikarenakan masyarakat diharuskan terlibat secara langsung dalam proses tersebut, sehingga mereka dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian yang dimilikinya. Prosesnya dilakukan secara kumulatif, sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang maka kemampuan berpartisipasi akan semakin baik”. (interview, 21 Juni 2014).

Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering process*). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memapukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah yang mereka hadapi, memikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah tersebut, dan mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah.

a. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Seperti wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Irfan Hasyim 45 tahun pekerjaan petani (masyarakat desa Curahmalang):

“Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di desa Curahmalang ini, saya dianjurkan untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam perbaikan lingkungan sekitar seperti perbaikan jalan desa yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang”. (interview, 23 Juni 2014).

Dengan demikian dalam program PNPM Mandiri Perdesaan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat setempat ikut berperan aktif baik dalam mengutarakan pendapat dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut di atas didukung oleh pengakuan Kepala Desa Curahmalang, Bapak Yosep Yuliadi, S. Sos yang menyatakan bahwa:

“Saya melihat bahwa semua pengurus PNPM di desa ini mempunyai solidaritas internal yang tinggi dan merasa mempunyai tanggungjawab serta mendapat amanah terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Hal tersebut mereka tunjukkan dalam bentuk musyawarah yang sering mereka adakan. Tentu saja yang hadir bukan hanya dari pihak pengurus tetapi juga dari pihak masyarakat, sehingga keputusan yang diambil adalah kombinasi dari pendapat pengurus program dan pihak masyarakat”. (interview 26 Juni 2014).

b. Kemandirian

Kemandirian adalah keinginan masyarakat untuk dapat berdiri sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Dari hasil wawancara yang saya dapat dari Ibu Nur Aini 50 tahun pekerjaan pedagang sayuran (pelaku program Simpan Pinjam bagi Perempuan) :

“Dengan adanya program Simpan Pinjam bagi Perempuan ini, saya diberi kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar saya dan keluarga, sehingga saya dapat menjadi lebih mandiri dari sebelumnya”. (interview, 30 Juni 2014).

Tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nur Aini, dari hasil wawancara saya dengan Ibu Lilis Solihati 37 tahun yang bekerja sebagai pedagang kebutuhan bahan pokok sehari-hari (pelaku program Simpan Pinjam bagi Perempuan):

Dengan adanya program Simpan Pinjam bagi Perempuan ini, saya mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Sehingga saya tidak terlalu bergantung kepada suami dan menjadi lebih mandiri serta dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari (interview, 30 Juni 2014).

Dengan demikian, adanya program SPP (simpan pinjam bagi perempuan) ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari, hal tersebut dikarenakan program SPP (simpan pinjam bagi perempuan) ini dapat membantu masyarakat untuk penambahan modal usahanya. Hal tersebut tercantum dalam surat An-

Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, partisipasi masyarakat yang dimaksud pada dasarnya adalah adanya keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada dilingkungan sekitar, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi

masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi segala macam perubahan.

Dari hasil wawancara yang saya dapat dari Bapak Muhammad Sholeh, selaku salah satu pengurus PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang bahwa setiap ada rencana program pembangunan oleh PNPM Mandiri Perdesaan akan melibatkan masyarakat setempat secara langsung untuk membahas agenda program pembangunan tersebut. Tentunya, dalam rapat tersebut semua pendapat akan ditampung dan dipertimbangkan terlebih dahulu, termasuk pendapat-pendapat dari perwakilan pihak pengurus maupun dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, partisipasi tersebut ditentukan oleh intensitas pertemuan dalam rapat yang digelar, sehingga menghasilkan suatu keputusan tidak terkecuali dari pihak perempuan yang terlibat didalamnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu dari pihak perempuan, yaitu Ibu Siti Aminah selaku pengurus program SPP (Simpan Pinjam bagi Perempuan):

“Sebagai perwakilan dari pihak perempuan, kami pun merasa punya tugas dan wewenang seperti pengurus lainnya dalam program ini. Setiap kali ada program terbaru yang akan dilaksanakan oleh PNPM di Curahmalang, tanpa harus di datangi dulu oleh petugas lainnya dalam menentukan keputusan mengenai program yang tepat, maka kami sudah tahu untuk ikut serta dalam mengambil keputusan program tersebut. Itu karena kami sebagai pihak perempuan juga merupakan salah satu unsur penentu keputusan program” (interview 05 Juli 2014).

Dari informasi yang diungkapkan di atas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa di Desa Curahmalang kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari pengurus program PNPM Mandiri Perdesaan selalu dilibatkan. Hal ini sangat ideal ketika diterapkan secara terus menerus dalam upaya mensejahterakan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat dari pihak masyarakat lebih rasional disbanding pendapat dari pihak pengurus program.

Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang telah direncanakan oleh para pelaku perubahan, masyarakat cenderung akan menjadi lebih tergantung pada para pelaku perubahan. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat pada para pelaku perubahan akan semakin meningkat.

3. Kendala Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik, mulai dari pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana, simpan pinjam bagi perempuan, meningkatkan fasilitas pendidikan sejak usia dini hingga fasilitas kesehatan. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah/kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut.

Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, selain itu harus

dibantu oleh tenaga pendamping (*field worker* atau fasilitator lapangan) biasanya dibantu oleh tenaga kader. Kader diharapkan dapat menggantikan peranan petugas pembangunan desa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Kader adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat setempat yang secara sukarela bersedia ikut serta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pembangunan desa. Kader dapat terdiri dari laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda (lebih diutamakan muda), sudah bekerja maupun yang belum bekerja, yang penting mereka merasa terpanggil tanpa adanya paksaan dari pihak lain sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal.

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak M. Yasin Yusuf, S. Sos (Tim Pengelola Kegiatan) mengenai kendala dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di desa Curahmalang kebanyakan dari perekrutan kader sukarela:

“Permasalahan kader pada umumnya adalah karena kader merupakan tenaga sukarela yang tidak jarang juga sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, apabila tugas utamanya menuntut keaktifannya, mereka akan mengesampingkan atau bahkan mengabaikan tugas mereka sebagai seorang kader”. (interview: 03 Juli 2014).

Masalah lain yang sering dihadapi oleh seorang kader adalah beban yang diberikan kepada seorang kader seringkali terlalu berat untuk jenis pekerjaan yang bersifat sukarela. Seorang kader seringkali diharuskan menjalankan peran dibidang yang diluar kemampuannya. Oleh karena itu, penambahan kader dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan para

kader yang merupakan modal utama manusia dalam suatu komoditas perlu direncanakan secara bertahap.

Permasalahan lain yang muncul kebanyakan dari masyarakat yang masih kurang dalam pemahamannya tentang program pemberdayaan tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan sehingga masyarakat kurang begitu memperhatikan atau bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Fahmi Aziz, S. Pd. I (Tim Penyusun Usulan) mengenai kendala lain dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di desa Curahmalang masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai program pemberdayaan dan belum mengerti tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan:

“Di Desa Curahmalang ini mayoritas masyarakatnya masih tidak tahu tentang apa sebenarnya program pemberdayaan itu, dan tidak mengerti apa tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Sudah menjadi tugas kami sebagai kader dari PNPM Mandiri Perdesaan untuk mensosialisasikan tentang program pemberdayaan serta berbagai program dari PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung serta berperan aktif dalam pelaksanaan program-program tersebut”. (interview: 05 Juli 2014).

Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, maka tugas dari kader yang telah terpilih sebelumnya untuk mensosialisasikan program-program dari PNPM Mandiri Perdesaan sehingga masyarakat lebih mengerti dan ikut

berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan berbagai program tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

4. Solusi Dari Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil wawancara dengan Bapak Puji Santoso, selaku Tim Verifikasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rambipuji, menyampaikan bahwasannya penanganan permasalahan program akan dikoordinasikan secara bertahap antara Tim Pengelola Kegiatan dengan Tim Verifikasi:

“Untuk mengatasi kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan dari PNPM Mandiri Perdesaan ada beberapa cara, yaitu melakukan pengamatan terhadap kader tersebut, apabila kader tersebut terbukti melalaikan tugasnya maka akan mendapatkan pembinaan maupun teguran. Jika setelah mendapatkan pembinaan kader tersebut masih sering melalaikan tugasnya, maka akan diberhentikan.” (interview 08 Juli 2014).

Apabila hasil pengamatan sudah dipastikan kebenarannya, maka di lanjutkan dengan membuat keputusan apakah kader tersebut masih layak untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang kader atau akan diberhentikan. Selanjutnya yaitu memonitor langkah-langkah yang telah dilakukan sampai permasalahan selesai. Dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil penanganan masalah sampai permasalahan selesai.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam penanganan permasalahan ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pengaduan atau permasalahan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

- b. Pertemuan dengan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan kelompok masyarakat tertentu.
- c. Pada saat klarifikasi, rahasiakan identitas orang yang membuat pengaduan terkecuali yang bersangkutan menghendaknya, dan jangan terjebak lebih pada mencari orang yang mengadukan tetapi melupakan isi pengaduannya.

Adapun menurut Bapak M. Yasin Yusuf, S. Sos selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan menyatakan bahwa dalam penanganan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan yaitu melakukan sosialisasi tentang apa saja program yang akan dilaksanakan di Desa Curahmalang. Sosialisasi tentang program yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara mengundang masyarakat untuk datang ke tempat yang telah disediakan, dan sosialisasi tersebut akan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan serta para kader yang telah dipilih. Hal tersebut sudah menjadi tugas dari Tim Pengelola Kegiatan serta para kader untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan bersama untuk memberdayakan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat mengerti tentang program tersebut serta bisa ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis mencantumkan dua point yang perlu diketahui yaitu, pertama tentang kesimpulan dari isi skripsi ini yang telah peneliti bahas pada bab diatas, dan kemudian point kedua berisi saran-saran.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember menggunakan metode pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian mencari solusi dengan mendiskusikan bersama bagaiman cara mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan menggunakan teknik *motivating* dan *supporting* bisa digunakan untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka agar dapat menimbulkan kesadaran, menggalang kesatuan, dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam menangani masalah tersebut, dengan demikian masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung dalam meningkatkan taraf hidupnya.

1. Strategi pemberdayaann ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan

Maksud dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah cara para pekerja sosial untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan,

keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Strategi Dasar

Strategi dasar yaitu meliputi mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemapan dan kemandirian masyarakat. Menjalni kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

b. Strategi Operasional

Strategi Operasional mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. Memperkuat peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.

2. Kendala pemberdayaann ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan

Permasalahan yang biasanya muncul lebih sering pada saat pencarian/perekrutan kader, yaitu kader pada umumnya adalah karena

kader merupakan tenaga sukarela yang tidak jarang juga sudah mempunyai pekerjaan yang tetap.

Banyak masyarakat yang masih belum mengerti tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan sehingga masyarakat kurang begitu memperhatikan atau bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam musyawarah sebelumnya.

3. Solusi Dari Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan

Untuk mengatasi permasalahan kader yang melalaikan tugasnya yaitu dengan cara melakukan pengamatan oleh Tim Verifikasi, apabila kader tersebut terbukti melalaikan tugasnya maka akan diberikan teguran maupun pembinaan agar kader tersebut tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang kader. Apabila kader tersebut setelah mendapatkan pembinaan masih melalaikan tugasnya, maka kader tersebut akan diberhentikan.

Sedangkan untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dengan cara mengundang masyarakat untuk datang ke tempat yang telah disediakan, dan sosialisasi tersebut akan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan serta para kader yang telah dipilih. Hal tersebut sudah menjadi tugas dari Tim Pengelola Kegiatan serta para kader untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan bersama untuk memberdayakan masyarakat tersebut.

B. Saran-saran

Selama pelaksanaan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan atau sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantara saran-saran yang dimaksud yaitu:

1. Bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan agar semua kegiatan yang sudah terlaksana tersebut bisa terus berkelanjutan, sehingga sebagai pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tidak sia-sia dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan supaya kehidupan masyarakat desa Curahmalang menjadi lebih sejahtera.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat bisa melestarikan program yang sudah ada, supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung kepada pemerintah dan bisa hidup lebih mandiri.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya agar lebih disempurnakan lagi, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam.

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS PADA PNPM MANDIRI PEDESAAN DESA
CURAHMALANG KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN
JEMBER) TAHUN 2013-2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah



Oleh:

Aqdian Rifqi
NIM: 083 092 007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARIAH
Oktober 2015**

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS PADA PNPM MANDIRI PEDESAAN DESA
CURAHMALANG KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN
JEMBER) TAHUN 2013-2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

Oleh:

Aqdian Rifqi
NIM: 083 092 007

Disetujui Pembimbing

M. F. Hidayatullah, M. S. I
NIP. 19760812 200801 1 015

IAIN JEMBER

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(STUDI KASUS PADA PNPM MANDIRI PEDESAAN DESA
CURAHMALANG KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN
JEMBER) TAHUN 2013-2014**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei)
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

DR. H. Sutrisno RS., M.H.I

NIP. 19590216 198903 1 001

Agung Parmono, M.Si

NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota :

1. Muhaimin, M.H.I

(NIP. 19590216 198903 1 001)

2. M.F. Hidayatullah, M.S.I

(NIP. 19590216 198903 1 001)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

DR. H. Sutrisno RS., M.H.I

NIP. 19590216 198903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Latar belakang Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	65
Daftar Pustaka	66
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR PUSTAKA

Adi Isbandi, Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikuntunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT. Raja Grafindo.

Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Fathoni, Abdurrahmat. 21006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Press.

<http://pnpmjember.blogspot.com/2013/07/apa-itu-pnpmmandiri-perdesaan.html>

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

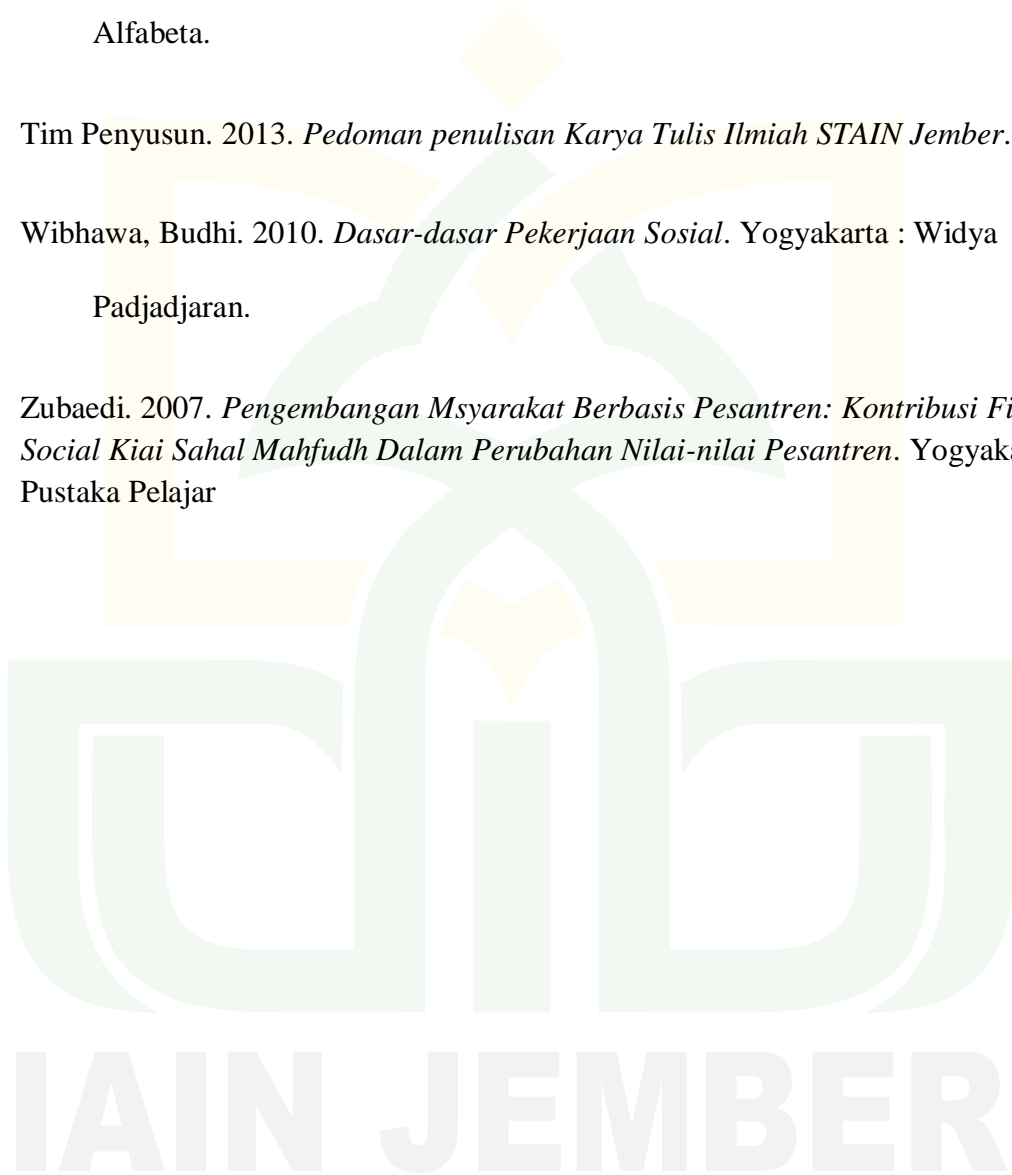
Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah STAIN Jember*.

Wibhawa, Budhi. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Widya Padjadjaran.

Zubaedi. 2007. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fight Social Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>a. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>b. Kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>c. Solusi dari kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat</p>	<p>Pengembangan Masyarakat (community development)</p> <p>1) Kemandirian</p> <p>2) Partisipasi</p> <p>1. Kader yang mengabaikan tugasnya</p> <p>2. Kurangnya pemahaman masyarakat</p> <p>1. Melakukan pembinaan kader</p> <p>2. Melakukan sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan</p>	<p>3. Informan</p> <p>a. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)</p> <p>b. Ketua TPU (Tim Penyusun Usulan)</p> <p>c. Kader pemberdayaan masyarakat</p> <p>d. Masyarakat</p> <p>4. Kepustakaan</p> <p>a. Buku pokok</p> <p>b. Website</p> <p>c. Dokumen penting</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif Dengan Jenis Penelitian Studi Kasus</p> <p>2. Penentuan Subjek Penelitian: Purposive Sampling</p> <p>3. Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Observasi ➤ Interview ➤ Dokumentasi <p>4. Metode Analisa Data Menggunakan Deskriptif Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan <p>5. Keabsahan Data: Metode Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Pokok Masalah Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada PNPM Mandiri Pedesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?</p> <p>2. Sub Pokok Masalah</p> <p>a. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?</p> <p>b. Bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?</p> <p>c. Apa saja kendala yang dihadapi pada pemberdayaan ekonommi masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember?</p>